

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar yaitu ditinjau dari kemampuan seseorang bertanggungjawab berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana.
Berdasarkan fakta dipersidangan terungkap bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara a quo mampu bertanggungjawab.
 - b. Kesalahan terdakwa sebagai salah satu syarat pemidanaan
Dari uraian pertimbangan hakim ditemukan bahwa pelaku memiliki kesalahan dalam mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar adalah ;
 - a. Faktor hukumnya sendiri.
Pengaturan tentang peredaran sediaan farmasi belum lengkap dan masih memiliki berbagai kekurangan di berbagai sisi. Aturan masih rigid dan tidak fleksibel.
 - b. Faktor penegak hukumnya.

Keterbatasan aparat penegak hukum dan masih adanya ancaman bagi para petugas yang melakukan razia di berbagai daerah.

c. Faktor sarana dan prasarana dalam penegakan hukum

Ketidaktersediaan kendaraan operasional yang memadai untuk melakukan razia dan penegakan hukum.

d. Faktor masyarakat

Pemahaman hukum yang minim dan sosialisasi terhadap masyarakat larangan penjualan sediaan farmasi tanpa izin.

e. Faktor budaya hukum

Sikap masyarakat yang acuh terhadap berbagai problematika yang ada ditengah-tengah masyarakat termasuk masalah peredaran sediaan farmasi tanpa edaar.

B. Saran

Selanjutnya disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Perlu diadakannya razia dan pengawasan peredaran obat dan makanan secara teratur dan berkesinambungan. Memberikan penyuluhan yang kontiniu kepada masyarakat guna menciptakan masyarakat yang kritis dan berpendidikan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang sadar hukum (KADARKUM).
2. Perlu diadakan peningkatan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kinerja BBPOM, menjalin kerja sama dengan berbagai instansi terkait meningkatkan daya saing kerja sehingga berbagai kekuarangan bisa saling menutupi, khususnya dengan pihak kepolisian.